PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN/ KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

MUHAMMAD RIZKY RIVALDO
NIM. B1011181060

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

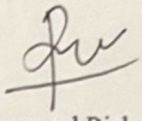
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	Muhammad Rizky Rivaldo
NIM	B1011181060
Jurusan	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak,30 Juni 2025



Muhammad Rizky Rivaldo

NIM.B1011181060

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Rizky Rivaldo
N I M	:	B1011181060
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	:	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 10 Juni 2025

nyataan



Rizky Rivaldo

NIM. B1011181060

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Muhammad Rizky Rivaldo
B1011181060

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 30 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Prof. Dr. H. Eddy Suratman., S.E., M.A	22/8/25	
		NIP 196707071992021001		
2.	Ketua Penguji	Dr. Windhu Putra., S.E., M.Si.	18/8/25	
		NIP 196404281989031004		
3.	Anggota Penguji	Rio Laksamana., S.E., M.E.	10/8/25	
		NIDN. 1110098503		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 23 SEP 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fanio, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat"** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko., S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Barkah., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Hj. Nurul Bariyah., S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Metasari Kartika., S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Yanto., S.E., M.Sc., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Prof. Dr. H. Eddy Suratman., S.E., M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
7. Dr. Windhu Putra., S.E., M.Si., sebagai Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.

8. Rio Laksamana., S.E., M.E., sebagai Dosen Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kedua orangtuaku, terimakasih atas doa restu, kasih sayang, semangat dan material dalam menyelesaikan studi ini. Motivasi, pengorbanan serta kesabaran yang berlimpah pada penulis sejak kecil sampai saat ini dan seterusnya yang tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan Tugas Akhir ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 10 Juni 2025
Peneliti,

Muhammad Rizky Rivaldo
NIM. B1011181060

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat" karena penulis ingin menganalisis bagaimana ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan aktivitas produktif masyarakat, pendidikan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, sementara upah minimum berpengaruh pada motivasi dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan tepat sasaran.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang semakin baik, dan penetapan upah minimum yang ideal seharusnya mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Namun, di Provinsi Kalimantan Barat, meskipun data menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka partisipasi pendidikan, dan penyesuaian upah minimum, tingkat penyerapan tenaga kerja di beberapa kabupaten dan kota masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah bersifat padat modal dan tidak menciptakan banyak lapangan kerja. Selain itu, lulusan pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kerja, dan upah minimum kadang justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil menengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun kontribusi yang diharapakan adalah sebagai berikut: Adapun kontribusi secara teoritis penelitian ini sebagai informasi ilmiah

dan wawasan ilmu pengetahuan terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam kajian pada bidang dan masalah yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Adapun kontribusi secara praktis dimana temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada daerahnya masing-masing.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian pendekatan kuantitatif, dengan sumber data sekunder. Adapun jumlah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini berjumlah 112, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2024 (14 Kabupaten/ Kota) di Provinsi Kalimantan Barat. meliputi uji model data panel (*common effect model, fixed effect model* dan *random effect model*), pemilihan model data panel (*chow test*, *hausman test* dan *lagrange multiplier test*), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas), persamaan regresi liniear berganda dan terakhir uji hipotesis (kelayakan model *(goodness of fit)*, parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2)). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) pengaruh positif dan tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja (diukur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja) pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2) pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah) terhadap penyerapan tenaga kerja (diukur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja) pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 3) pengaruh positif dan signifikan antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja (diukur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja) pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan penelitian: 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2017 hingga 2024. Temuan ini mencerminkan bahwa peningkatan PDRB belum diikuti

oleh peningkatan partisipasi angkatan kerja secara proporsional karena pertumbuhan masih didorong oleh sektor-sektor kapital intensif dan belum diiringi transformasi struktural yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas, 2) Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini memperkuat teori modal manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan kesiapan individu untuk terlibat dalam pasar kerja, 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2017 hingga 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum mampu mendorong individu usia kerja untuk lebih aktif terlibat dalam pasar kerja, terutama di wilayah dengan akses ekonomi terbatas.

Saran penelitian: 1) Pemerintah daerah perlu mengarahkan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada inklusivitas tenaga kerja, dengan mendorong sektor-sektor padat karya dan memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasional sesuai kebutuhan industri, 2) Pemerintah daerah perlu terus memperkuat investasi di sektor pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, 3) Pemerintah daerah sebaiknya terus mengkaji dan menetapkan kebijakan upah minimum secara adaptif, disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah.

Jurnal Pembangunan dan Pemerataan (JPP)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat

[1] Muhammad Rizky Rivaldo

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of economic growth, education, and minimum wages on labor absorption in the regencies/ cities of West Kalimantan Province. The type of method used in this study is descriptive-quantitative. The data amounted to 112, namely from 2017 to 2024 (14 regencies and cities). Furthermore, the methods and analytical tools used are panel data methods, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The tool in processing the data used the eviews software program version 10.0. The results of the data analysis show that 1) economic growth has a positive but insignificant effect on labor absorption, 2) education has a positive and significant effect on labor absorption, and finally 3) minimum wages have a positive and significant effect on labor absorption.

Keywords: Economic Growth, Education, Minimum Wage Labor Absorption.

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Adapun data berjumlah 112, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 (14 Kabupaten dan Kota). Selanjutnya metode dan alat analisis yang digunakan ialah metode data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pengujian hipotesis. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *software eviews versi 10.0*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 2) pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan terakhir 3) upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja.

[1]mrrivaldo2900@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyerapan tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang berhasil dipekerjakan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Secara lebih rinci, penyerapan tenaga kerja mencerminkan kemampuan suatu perekonomian atau sektor usaha dalam menyerap jumlah angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Buchari, 2016). Penyerapan tenaga kerja yang tinggi menunjukkan bahwa banyak penduduk usia produktif dapat bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja rendah, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Penyerapan tenaga kerja juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah dan kondisi pasar tenaga kerja (Wahyuni & Arisetyawan, 2024).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan berbagai sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Keberadaan sektor-sektor ini membuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat mencerminkan kemampuan provinsi ini dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Seiring dengan berkembangnya investasi dan pembangunan infrastruktur, kesempatan kerja di berbagai bidang pun semakin meningkat. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 s/d 2024 (Persen)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sambas	70,01	71,53	71,76	74,28	68,45	68,97	69,42	70,44	70,61
2	Bengkayang	73,60	76,23	73,47	75,81	72,84	74,12	72,72	72,78	73,95
3	Landak	75,22	74,70	68,74	71,78	70,16	69,95	72,93	72,48	72,00
4	Mempawah	64,40	65,16	63,12	64,14	70,19	72,29	71,13	71,83	67,78
5	Sanggau	70,43	72,80	69,18	70,38	60,86	63,31	68,27	73,07	68,54
6	Ketapang	59,76	66,39	65,53	60,75	69,41	70,27	70,31	71,69	66,76
7	Sintang	71,74	71,85	72,01	75,57	64,44	60,57	66,48	66,73	68,67
8	Kapuas Hulu	78,38	76,14	77,22	74,09	77,78	73,14	74,12	74,96	75,73
9	Sekadau	82,03	76,64	77,38	77,53	72,35	77,68	72,28	76,02	76,49
10	Melawi	77,60	73,75	74,57	73,93	71,98	74,31	73,77	76,65	74,57
11	Kayong Utara	59,69	65,82	66,43	65,53	72,31	74,41	73,73	75,07	69,12
12	Kubu Raya	63,90	62,45	64,86	67,71	65,53	70,02	72,54	71,70	67,34
13	Pontianak	63,66	61,26	61,75	60,05	67,47	64,66	65,28	65,83	63,75
14	Singkawang	64,02	61,19	67,04	63,84	61,94	64,82	63,47	64,53	63,86
Kalimantan Barat		**68,63**	**68,86**	**68,51**	**68,83**	**64,31**	**68,86**	**66,60**	**66,12**	**67,59**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1 menjelaskan perkembangan TPAK pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2017 sampai dengan 2024. Kabupaten Sambas meningkat dari 70,01% (2017) menjadi 74,28% (2020). Kabupaten Landak mengalami penurunan dari 75,22% (2017) menjadi 68,74% (2019), namun naik kembali menjadi 72,48% (2024). Sementara Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Sedangkan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan dari periode 2018 sampai dengan 2024, serta Kabupaten Melawi cenderung stabil dari 77,60% (2017) sampai 76,65% (2024).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam upaya pembangunan tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penting untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan pembangunan untuk periode yang akan datang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat di artikan Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Soleh, 2020).

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi di 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 s/d 2024 (Persen)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sambas	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,37	4,64	4,66	4,74	3,89
2	Bengkayang	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45	5,32	4,75	4,23
3	Landak	5,17	4,92	4,88	-0,71	4,89	4,65	4,72	4,54	4,13
4	Mempawah	5,87	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70	5,09	6,62	4,76
5	Sanggau	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61	6,65	4,14	4,09
6	Ketapang	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,43	6,53	4,89	5,40
7	Sintang	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96	4,68	4,89	3,95
8	Kapuas Hulu	5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43	5,43	4,61	4,75	3,83
9	Sekadau	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10	6,14	4,86	4,57
10	Melawi	4,70	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90	4,56	4,76	4,00
11	Kayong Utara	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59	5,03	4,48	4,52	4,14
12	Kubu Raya	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,18	4,98	4,99	4,43
13	Pontianak	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,60	5,40	4,76	5,03	3,63
14	Singkawang	5,38	4,64	4,41	-2,51	4,82	5,05	5,06	5,06	3,99
Kalimantan Barat		**5,17**	**5,07**	**5,09**	**-1,82**	**4,80**	**5,07**	**4,90**	**4,46**	**4,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2017 sampai dengan 2024, sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil pada periode 2017 sampai dengan 2019. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hampir semua daerah mengalami pertumbuhan negatif di tahun tersebut. Tahun 2021 sampai

dengan 2024 menunjukkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, sebagian besar daerah mulai tumbuh kembali pada tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota menunjukkan peningkatan yang lebih kuat pada tahun 2022 dan 2023, dengan beberapa daerah mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi, seperti Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Mempawah.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat yang belum merata, di mana beberapa daerah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, sedangkan daerah lainnya masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Variasi ini dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, akses terhadap infrastruktur, serta tingkat investasi dan kegiatan produktif yang berlangsung di masing-masing wilayah. Pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan seseorang melalui pengajaran, pembelajaran, dan pengalaman. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang membantu mereka memahami dunia, berinteraksi dengan lingkungan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral (Fauziah & Wijaya, 2023). Pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan, serta pendidikan informal yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan sosial. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan diri, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Tabel 3 Rata-Rata Lama Sekolah di 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 s/d 2024 (Tahun)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sambas	6,67	6,68	6,70	6,71	6,72	6,74	6,75	6,76	6,72
2	Bengkayang	6,09	6,27	6,53	6,76	6,80	7,00	7,22	7,41	6,76
3	Landak	7,08	7,09	7,10	7,11	7,12	7,15	7,24	7,46	7,17
4	Mempawah	6,47	6,63	6,82	7,03	7,04	7,17	7,20	7,21	6,95
5	Sanggau	6,93	6,94	6,95	7,15	7,39	7,41	7,44	7,47	7,21
6	Ketapang	7,03	7,04	7,26	7,31	7,46	7,48	7,55	7,68	7,35
7	Sintang	6,72	6,73	6,89	7,07	7,08	7,36	7,64	7,65	7,14
8	Kapuas Hulu	7,02	7,25	7,47	7,52	7,53	7,59	7,82	8,03	7,53
9	Sekadau	6,57	6,58	6,60	6,83	6,85	7,12	7,13	7,23	6,86
10	Melawi	6,53	6,66	6,67	6,76	6,91	7,18	7,42	7,66	6,97
11	Kayong Utara	5,85	5,86	6,00	6,01	6,02	6,21	6,35	6,54	6,11
12	Kubu Raya	6,58	6,81	6,82	6,83	7,00	7,02	7,04	7,05	6,89
13	Pontianak	9,79	9,90	10,14	10,17	10,43	10,44	10,45	10,47	10,22
14	Singkawang	7,30	7,57	7,72	7,89	7,90	8,19	8,21	8,22	7,88
Kalimantan Barat		**7,05**	**7,12**	**7,31**	**7,37**	**7,45**	**7,59**	**7,71**	**7,78**	**7,42**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3, rata-rata lama sekolah pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 hingga 2024. Kota Pontianak dan Singkawang

secara konsisten mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2024. Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang cukup pesat dari 7,02 tahun (2017) menjadi 8,03 tahun (2024). Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan angka mendekati atau bahkan melampaui 7 tahun (2024), sementara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayong Utara mencatatkan angka terendah. Kabupaten Sambas hanya naik dari 6,67 tahun (2017) menjadi 6,76 tahun (2024), sedangkan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki posisi terendah hanya meningkat dari 5,85 tahun (2017) menjadi 6,54 tahun (2024).

Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedalaman, serta kurangnya keterampilan teknis dan praktis pada sebagian lulusan. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk langsung penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi pendidikan terus berupaya mengembangkan program pelatihan keterampilan dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Firdaus (2022), menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan penelitian Windayana & Darsana (2020), menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu upah minimum. Upah Minimum adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai bentuk perlindungan agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup di daerah masing-masing. Di Provinsi Kalimantan Barat, upah minimum ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara tahunan. Penetapan ini tidak hanya berlaku di tingkat kabupaten dan kota, tergantung pada kondisi ekonomi dan perkembangan industri di wilayah tersebut (Yolanda & Maryam, 2025).

Upah minimum yang rendah di Provinsi Kalimantan Barat dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan berbagai cara. Di satu sisi, upah minimum yang relatif rendah membuat perusahaan lebih mudah mengalokasikan biaya tenaga kerja, sehingga mereka dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama di sektor industri padat karya dan usaha kecil menengah yang memiliki keterbatasan modal. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat pengangguran karena lebih banyak pekerjaan tersedia bagi masyarakat (Juardi & Nurjannah, 2024). Upah yang rendah juga berdampak pada daya beli pekerja yang menjadi terbatas, sehingga konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa terhambat. Selain itu, upah yang rendah membuat pekerja kurang termotivasi dan kualitas kerja menurun, serta berpotensi menyebabkan tenaga kerja berkualitas tinggi enggan bekerja di daerah tersebut dan lebih memilih migrasi ke wilayah dengan upah lebih baik (Rahayu, 2019).

Tabel 4 Upah Minimum di 14 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 s/d 2024 (Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sambas	2.022.800	2.377.000	2.580.000	2.580.000	2.600.000	2.609.393	2.792.599	2.831.473	2.549.158
2	Bengkayang	2.013.450	2.364.777	2.566.019	2.566.019	2.566.019	2.586.291	2.767.564	2.875.361	2.538.188
3	Landak	2.000.920	2.349.600	2.549.844	2.549.844	2.579.844	2.582.000	2.767.310	2.868.456	2.530.977
4	Mempawah	1.901.005	2.232.600	2.422.594	2.422.594	2.422.594	2.437.279	2.608.602	2.704.337	2.393.951
5	Sanggau	1.973.425	2.318.000	2.515.262	2.515.262	2.515.262	2.547.405	2.703.536	2.789.563	2.484.714
6	Ketapang	2.172.500	2.636.000	2.860.323	2.860.323	2.860.323	2.876.252	3.085.615	3.118.983	2.808.790
7	Sintang	2.025.000	2.393.000	2.596.644	2.596.644	2.596.644	2.611.966	2.771.035	2.854.277	2.555.651
8	Kapuas Hulu	2.028.000	2.381.700	2.483.000	2.483.000	2.483.000	2.486.796	2.661.842	2.746.009	2.469.168
9	Sekadau	1.931.180	2.267.970	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.486.031	2.654.771	2.702.616	2.428.196
10	Melawi	1.948.500	2.288.306	2.483.040	2.483.040	2.483.040	2.515.896	2.682.399	2.773.438	2.457.207
11	Kayong Utara	2.130.300	2.501.850	2.714.750	2.714.750	2.714.750	2.748.507	2.930.678	3.024.184	2.684.971
12	Kubu Raya	1.907.040	2.242.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000	2.467.630	2.646.879	2.702.616	2.408.146
13	Pontianak	1.972.000	2.318.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.579.616	2.750.645	2.840.206	2.500.683
14	Singkawang	1.991.529	2.338.840	2.537.875	2.537.875	2.537.875	2.596.120	2.781.899	2.886.916	2.526.116
Kalimantan Barat		**1.872.500**	**2.046.900**	**2.399.698**	**2.399.698**	**2.399.698**	**2.434.328**	**2.608.602**	**2.702.616**	**2.358.005**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas, menunjukan bahwa upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2024, upah minimum tersebut didasari karena adanya peningkatan kebutuhan pokok masyarakat, di mana upah digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pemerintah menetapkan jumlah besaran upah semakin tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upah minimum provinsi juga dari produktivitas tenaga kerja. Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juardi & Nurjannah (2024) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan penelitian Rahayu (2019) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendidikan yang semakin baik, dan penetapan upah minimum yang ideal seharusnya mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Namun, di Provinsi Kalimantan Barat, meskipun data menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka partisipasi pendidikan, dan penyesuaian upah minimum, tingkat penyerapan tenaga kerja di beberapa kabupaten dan kota masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah bersifat padat modal dan tidak menciptakan banyak lapangan kerja. Selain itu, lulusan pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kerja, dan upah minimum kadang justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil menengah. Berdasarkan belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.